INOVASI PROGRAM FORSAM (FORUM SOLUSI SAMPAH MASYARAKAT) SEBAGAI MODEL KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM PENGUATAN TATA KELOLA SAMPAH DI KAMPUNG KAWUNEN KELURAHAN TRITIH KOTA SERANG

Herli Noviansyah[1], Sastra Wijaya[2], Anita Sukmawati[3], Silatu Dzikri[4], Vika Ratih[5], Siti Nur[6], Liasa Noviar[7], Ayu Komalasari[8], Yayah[9], Afikoh[10], Nicki Aldi[11], Anggi Saputra[12], Sulaeman[13], Beye[14], Gress Nathalia[15], Usi Anggraeni[16]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Primagraha
[1]herlinovi78@gmail.com
[2]anitasukmawati456@gmail.com,

ABSTRACT

The problem of waste collection services in Kawunen Village, Teritih Subdistrict, Walantaka District, Serang City, is marked by the halt of collection services due to the previous disposal site no longer being usable. This situation makes it difficult for residents to manage household waste. The KKM activities of Group 19 from Primagraha University aim to establish FORSAM (Community Waste Solutions Forum) as a multi-stakeholder collaborative space to find and determine solutions as well as the mechanisms for waste collection services. The implementation method uses a participatory approach with collaborative governance principles through stages of problem identification, forum formation, solution discussion, third-party coordination, field surveys, agreement, and service implementation. Results show that FORSAM successfully brought together residents, neighborhood groups (RT/RW), community leaders, village government, and third parties to produce an agreement on waste collection services Transportation then resumed so that the community has a more organized mechanism in handling household waste. FORSAM became a form of collaborative innovation as well as a contribution from KKM Group 19 of Universitas Primagraha in supporting the sustainability of waste management services in Kampung Kawunen.

Keywords: *FORSAM, collaborative governance, waste management, transportation services, KKM.*

ABSTRAK

Permasalahan layanan pengangkutan sampah di Kampung Kawunen, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang ditandai dengan terhentinya layanan pengangkutan akibat tempat penampungan yang sebelumnya digunakan tidak lagi dapat dimanfaatkan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menangani sampah rumah tangga. Kegiatan KKM Kelompok 19 Universitas Primagraha bertujuan membentuk FORSAM (*Forum Solusi Sampah Masyarakat*) sebagai ruang kolaborasi multipihak dalam menemukan dan menentukan solusi serta mekanisme layanan pengangkutan sampah. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan prinsip *collaborative governance*

melalui tahapan identifikasi persoalan, pembentukan forum, pembahasan solusi, koordinasi pihak ketiga, survei lapangan, kesepakatan, dan implementasi layanan. Hasil menunjukkan bahwa FORSAM berhasil mempertemukan masyarakat, RT/RW, tokoh masyarakat, pemerintah kelurahan, dan pihak ketiga hingga menghasilkan kesepakatan layanan pengangkutan. Layanan pengangkutan kemudian kembali berjalan sehingga masyarakat memiliki mekanisme yang lebih terarah dalam menangani sampah rumah tangga. FORSAM menjadi bentuk inovasi kolaboratif sekaligus kontribusi KKM Kelompok 19 Universitas Primagraha dalam mendukung keberlanjutan layanan persampahan di Kampung Kawunen.

Kata Kunci: FORSAM, *collaborative governance*, pengelolaan sampah, layanan pengangkutan, KKM.

A. Pendahuluan

Permasalahan sampah masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume timbulan sampah terus meningkat setiap tahun (Fasya et al., 2025).

Meskipun berbagai upaya pengelolaan sampah terus dilakukan, kesenjangan antara timbulan dan sampah yang tertangani masih menjadi persoalan. Berdasarkan data terverifikasi *update* 2025 pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), sampah terkelola tercatat sebesar 35.697 ton per hari, sedangkan sampah belum terkelola mencapai 108.652 ton per hari (Kementerian Lingkungan Hidup, 2025). Persoalan tersebut juga terlihat di Kota Serang. Dalam pemberitaan ANTARA, timbulan sampah di Kota Serang mencapai sekitar 580–800 ton per hari, sedangkan sampah yang diangkut menuju TPSA Cilowong sekitar 419 ton per hari (Purnama sari, 2026)

Persoalan pengelolaan sampah pada akhirnya tidak hanya berada pada kemampuan pemerintah menyediakan layanan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan mekanisme pengelolaan di tingkat masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah berbasis sumber, sedangkan keberlangsungan operasional pengelolaan juga dipengaruhi oleh kemampuan pembiayaan yang menopang kegiatan persampahan (Laksmiwati et al., 2023; Nur et al., 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan layanan sampah

membutuhkan keterlibatan dan dukungan dari pihak-pihak yang berada di lingkungan masyarakat. Fenomena tersebut secara nyata ditemukan di Kampung Kawunen, Kelurahan Tritih, Kota Serang. Berdasarkan hasil observasi awal mahasiswa KKM Universitas Primagraha, masyarakat sebelumnya telah memiliki layanan pengangkutan sampah rumah tangga secara swadaya melalui iuran rutin. Namun, tempat penampungan yang selama ini digunakan tidak lagi dapat dimanfaatkan sehingga layanan pengangkutan sampah yang sebelumnya berjalan ikut terhenti. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kembali menghadapi persoalan dalam membuang dan mengangkut sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan tempat pembuangan sampah di Kampung Kawunen, tetapi juga belum tersedianya mekanisme pengangkutan yang mampu memastikan sampah masyarakat dapat diangkut secara rutin menuju lokasi pembuangan yang sesuai. Penyelesaian persoalan sampah ini membutuhkan ruang yang memungkinkan setiap pemangku kepentingan dan masyarakat duduk bersama, menyampaikan kebutuhan, mempertimbangkan alternatif solusi, dan menentukan mekanisme layanan yang dapat dijalankan. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa KKM Universitas Primagraha mengambil peran untuk menjembatani komunikasi antarpihak dalam merespons persoalan layanan sampah di Kampung Kawunen.

Kebutuhan untuk melibatkan dan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelesaian persoalan tersebut sejalan dengan pendekatan *collaborative governance*. Pendekatan ini menempatkan pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam proses bersama untuk menyelesaikan persoalan publik melalui dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pencapaian kesepakatan bersama (Anshell & Gash, 2008) Dalam pengelolaan sampah, kolaborasi memungkinkan pemerintah, masyarakat, dan aktor lainnya membangun koordinasi serta pembagian peran dalam merespons persoalan persampahan yang tidak dapat ditangani secara terpisah (Nandira & Soedarto, 2024; Pamungkas et al., 2024).

Kajian sebelumnya menunjukan bahwa pendekatan kolaboratif telah diterapkan dalam berbagai bentuk kelembagaan dan program. Kolaborasi pengelolaan sampah pada tingkat desa juga dikaji oleh Prasetyani dan Isbandono, (2025) sedangkan Wicaksana et al., (2025) melihat kolaborasi dalam pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari pelayanan publik. Pada konteks perkotaan,Sabarna dan Ramdani, (2025) menunjukkan bahwa kolaborasi juga dipengaruhi oleh hubungan antarpihak, kepemimpinan, dan kemampuan membangun koordinasi dalam pengelolaan sampah. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat, penyediaan sarana, pembiayaan, kelembagaan, maupun kolaborasi dalam sistem pengelolaan yang telah tersedia. Sementara itu, kajian mengenai proses membangun kolaborasi sebagai respons terhadap persoalan belum tersedianya tempat pembuangan dan mekanisme pengangkutan sampah di tingkat kampung masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi ruang kajian dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan KKM ini diarahkan pada pembentukan FORSAM (Forum Solusi Sampah Masyarakat) sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, Pemerintah Kelurahan Tritih, dan pihak ketiga dalam merespons persoalan ketiadaan tempat pembuangan serta belum tersedianya mekanisme pengangkutan sampah di Kampung Kawunen. Melalui forum ini, mahasiswa KKM berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani komunikasi antarpihak untuk membahas alternatif dan menyepakati mekanisme layanan pengangkutan sampah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola sampah berbasis kolaborasi dan mendorong keberlanjutan layanan pengangkutan sampah di Kampung Kawunen.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan menerapkan prinsip *collaborative governance*, yang menempatkan berbagai pemangku kepentingan

dalam proses identifikasi persoalan, pembahasan alternatif, pengambilan keputusan, dan tindak lanjut kegiatan. Pendekatan tersebut digunakan karena persoalan layanan pengangkutan sampah di Kampung Kawunen tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dalam menentukan mekanisme layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Kampung Kawunen, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang selama pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Primagraha Tahun 2026. Sasaran kegiatan meliputi Pemerintah Kelurahan Teritih, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, masyarakat Kampung Kawunen, dan pihak ketiga yang berpotensi mendukung layanan pengangkutan sampah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi persoalan, koordinasi dan pemetaan pemangku kepentingan, fasilitasi pembentukan FORSAM, pembahasan alternatif mekanisme layanan, serta penyusunan kesepakatan dan tindak lanjut.

C.Hasil dan Pembahasan

Program FORSAM (*Forum Solusi Sampah Masyarakat*) di Kampung Kawunen dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan mahasiswa KKM Universitas Primagraha, masyarakat, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, Pemerintah Kelurahan Teritih, serta pihak ketiga. Rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk menghasilkan alternatif penyelesaian terhadap persoalan layanan persampahan, FORSAM juga menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi, menyelaraskan kepentingan, dan mencapai kesepakatan berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampung Kawunen. Berikut merupakan uraian hasil pelaksanaan program:

1. Identifikasi persoalan sampah

Tahap awal program dilakukan melalui identifikasi kondisi pengelolaan sampah di Kampung Kawunen. Berdasarkan hasil pengamatan dan komunikasi awal dengan masyarakat, diketahui bahwa persoalan utama bukan semata-mata pada perilaku masyarakat dalam membuang sampah, tetapi pada terhentinya

layanan pengangkutan yang sebelumnya telah berjalan secara swadaya melalui iuran masyarakat. Kondisi tersebut terjadi setelah tempat penampungan yang selama ini digunakan tidak lagi dapat dimanfaatkan. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengangkut sampah rumah tangga secara rutin menuju lokasi pembuangan yang sesuai.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan sampahan di Kampung Kawunen memiliki dimensi tata kelola layanan, karena keberlanjutan pengelolaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sarana, tetapi juga oleh kejelasan peran, mekanisme layanan, dan hubungan antarpihak. Menurut Kurhayadi, (2021) pengelolaan sampah melalui *collaborative governance* membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dengan kepercayaan, akuntabilitas, serta pertukaran informasi sebagai bagian penting dalam proses kolaborasi. Dengan demikian, identifikasi persoalan menjadi dasar untuk menggeser penanganan sampah dari persoalan individual masyarakat menjadi persoalan bersama yang membutuhkan penyelesaian antarpemangku kepentingan.



Gambar 1. Survei kondisi sampah di Kampung Kawunen oleh mahasiswa

2. Pembentukan FORSAM

Hasil identifikasi persoalan kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan FORSAM sebagai ruang pertemuan multipihak. Forum ini mempertemukan masyarakat, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, Pemerintah Kelurahan Teritih, mahasiswa KKM, dan pihak yang berpotensi mendukung layanan pengangkutan sampah. Pembentukan forum dilakukan karena persoalan yang dihadapi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya melalui keputusan satu pihak. Masing-masing pihak memiliki sumber daya, kepentingan, dan kapasitas yang berbeda dalam menentukan keberlanjutan layanan.

FORSAM berfungsi sebagai ruang untuk mempertemukan kepentingan dan membangun pemahaman bersama mengenai persoalan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan penelitian Prasetyani dan Isbandono, (2025) yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melibatkan pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan, kewenangan, dan kapasitas yang berbeda sehingga pemetaan serta koordinasi antarpihak menjadi penting dalam tata kelola persampahan. Pembentukan FORSAM dengan demikian tidak ditempatkan sebagai kegiatan pengolahan sampah, melainkan sebagai inovasi kelembagaan pada tingkat masyarakat untuk membangun mekanisme penyelesaian persoalan layanan pengangkutan.

3. Pembahasan alternatif solusi dalam forum

Setelah FORSAM terbentuk, pertemuan awal diarahkan pada pembahasan alternatif penyelesaian terhadap terhentinya layanan pengangkutan sampah. Pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat menyampaikan kondisi yang dihadapi serta mempertimbangkan kemungkinan mekanisme layanan yang dapat diterapkan. Salah satu alternatif yang kemudian dibahas adalah keterlibatan pihak ketiga sebagai alternatif solusi yang dipilih dimana pihak ketiga berperan sebagai penyedia jasa pengangkutan sampah. Pembahasan alternatif menjadi bagian penting karena keputusan layanan tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui proses pertukaran informasi dan pertimbangan bersama. Pada pertemuan berikutnya, pihak-pihak yang terlibat kembali membahas alternatif tersebut hingga diperoleh pilihan mekanisme yang dinilai paling memungkinkan untuk diterapkan. Proses ini menunjukkan adanya upaya membangun keputusan bersama berdasarkan kondisi dan kemampuan masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ariyadi dan Afriandi, (2024) yang menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah berperan penting dalam mendukung implementasi

kebijakan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks FORSAM, proses pembahasan alternatif memperlihatkan bahwa kolaborasi tidak berhenti pada keterlibatan aktor, tetapi diwujudkan melalui proses bersama dalam menentukan pilihan penyelesaian yang dapat diterapkan.





Gambar 2. dan 3 Pertemuan bersama Pemerintah Kelurahan Teritih RT/RW dan tokoh masyarakat serta pemuda dalam pembentukan FORSAM

4. Koordinasi dengan pihak ketiga

Setelah solusi pengangkutan melalui pihak ketiga memperoleh kesepakatan awal, FORSAM melanjutkan proses melalui koordinasi dengan pihak ketiga yang akan terlibat dalam penyediaan layanan. Pertemuan dilakukan untuk membahas mekanisme kerja sama secara lebih rinci, termasuk kebutuhan layanan pengangkutan dan bentuk pelaksanaan yang dapat diterapkan di Kampung Kawunen. Tahap ini menjadi penghubung antara hasil pembahasan internal FORSAM dengan pihak yang akan menjalankan layanan secara langsung.

Keterlibatan pihak ketiga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan persampahan tidak hanya mengandalkan kapasitas masyarakat dan pemerintah, tetapi juga dapat memanfaatkan sumber daya aktor nonpemerintah. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Ma'ruf et al., (2025) yang menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah dapat melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat melalui pembagian peran dalam penyediaan dan pengelolaan layanan.

5. Survei kondisi lapangan

Sebelum kesepakatan kerja sama ditetapkan, dilakukan survei lapangan untuk melihat kondisi persampahan dan kebutuhan layanan secara langsung. Survei dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sampah di lingkungan Kampung Kawunen serta memastikan bahwa alternatif mekanisme

pengangkutan yang telah dibahas sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Tahap ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan forum tidak hanya berdasarkan pembahasan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan. Penggunaan observasi lapangan dalam proses kolaborasi juga ditemukan dalam penelitian Anisykurlillah et al., (2024) yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap persoalan persampahan membutuhkan pengamatan terhadap kondisi lokal dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari proses tata kelola. Dalam FORSAM, survei lapangan menjadi dasar untuk menghubungkan hasil kesepakatan forum dengan kebutuhan operasional layanan pengangkutan sampah.



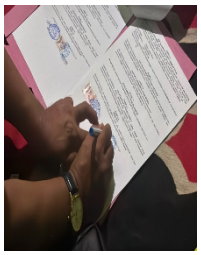
Gambar 4. Survei lapangan mahasiswa, RT/RW bersama pihak ke tiga di Kampung Kawunen

6. Kesepakatan *final* dan penandatanganan kontrak

Setelah melalui berbagai pembahasan alternatif, koordinasi dengan pihak ketiga, dan survei kondisi lapangan, proses dilanjutkan dengan penetapan kesepakatan melalui penandatanganan kerja sama. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk konkret dari kesepakatan para pihak mengenai mekanisme layanan pengangkutan sampah yang akan diterapkan di Kampung Kawunen. Tahap ini menunjukkan adanya pergeseran dari proses komunikasi dan pembahasan menuju komitmen yang lebih terstruktur untuk menjalankan layanan. Kesepakatan formal memiliki arti penting dalam menjaga kejelasan komitmen dan pembagian peran antaraktor.

Menurut (Erfanti & Nurdin, 2024) kolaborasi pengelolaan sampah menghadapi tantangan pada aspek pengaturan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. karena itu, penandatanganan dalam program FORSAM tidak hanya dipahami sebagai kegiatan

administratif, tetapi sebagai instrumen untuk memperjelas komitmen para pihak dalam mendukung keberlanjutan layanan pengangkutan sampah.




Gambar 5. adalah foto penandatanganan kontrak dan kesepakatan kerja sama

7. Implementasi layanan Angkutan

Tahap akhir ditandai dengan mulai berjalannya kembali layanan pengangkutan sampah melalui mekanisme yang telah disepakati bersama. Dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, masyarakat memperoleh kembali alternatif layanan untuk mengangkut sampah rumah tangga secara lebih terarah. Penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa FORSAM tidak berhenti pada pembentukan forum atau diskusi antarpihak, tetapi menghasilkan tindak lanjut berupa mekanisme layanan yang dapat diterapkan di tingkat masyarakat.

Pelaksanaan FORSAM menghasilkan bahwa persoalan layanan pengangkutan sampah di Kampung Kawunen dapat ditangani melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan kesepakatan yang dibangun secara bersama. Setelah layanan pengangkutan dengan pihak ketiga mulai berjalan, masyarakat memiliki kepastian dalam menangani sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari. Persoalan yang sebelumnya menimbulkan kebingungan akibat terhentinya layanan pengangkutan secara bertahap memperoleh solusi melalui mekanisme layanan yang telah disepakati. Dengan demikian,

FORSAM tidak hanya menjadi ruang untuk mempertemukan dan mengomunikasikan kepentingan antarpihak, tetapi juga menghasilkan mekanisme layanan yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat Kampung Kawunen.

Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa keberlanjutan perlu menjadi perhatian setelah kegiatan KKM Kelompok 19 Universitas Primagraha selesai dilaksanakan. FORSAM diharapkan tidak hanya berjalan selama mahasiswa berada di Kampung

Kawunen, tetapi dapat terus dilanjutkan melalui peran masyarakat, pengurus RT/RW, Pemerintah Kelurahan Teritih, serta pihak-pihak yang terlibat dalam layanan pengangkutan. Keberlanjutan diperlukan agar mekanisme yang telah terbentuk dapat tetap berjalan dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat di kemudian hari. Dalam proses pembentukannya, mahasiswa KKM Kelompok 19 Universitas Primagraha berperan sebagai fasilitator yang menginisiasi, mempertemukan, dan menjembatani komunikasi antarpihak, sedangkan keberlangsungan layanan selanjutnya menjadi tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan di Kampung Kawunen.

FORSAM pada akhirnya menjadi bentuk pengabdian KKM Kelompok 19 Universitas Primagraha yang berangkat dari persoalan nyata dan diarahkan pada penyelesaian melalui kolaborasi antarpihak. Program ini diharapkan tidak berhenti sebagai bagian dari rangkaian kegiatan KKM, tetapi dapat meninggalkan mekanisme yang tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Kawunen setelah masa pengabdian berakhir. Penyelesaian persoalan pengangkutan sampah melalui FORSAM menunjukkan bahwa kontribusi mahasiswa dalam kegiatan pengabdian tidak hanya dapat diwujudkan melalui kegiatan yang bersifat sementara, tetapi juga melalui gagasan, fasilitasi, dan mekanisme penyelesaian yang dapat diteruskan oleh masyarakat serta pemangku kepentingan setempat.

D. Kesimpulan

Program FORSAM (*Forum Solusi Sampah Masyarakat*) di Kampung Kawunen, Kelurahan Teritih, Kota Serang telah berhasil dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian mahasiswa KKM Kelompok 19 Universitas Primagraha dengan melibatkan masyarakat, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, Pemerintah Kelurahan Teritih, dan pihak ketiga. Program ini memberikan kontribusi dalam menyelesaikan persoalan terhentinya layanan pengangkutan sampah yang sebelumnya menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menangani sampah rumah tangga. Melalui pembentukan forum, pembahasan alternatif, koordinasi dengan pihak ketiga, survei lapangan, hingga penandatanganan kesepakatan, FORSAM berhasil

mendorong kembali tersedianya layanan pengangkutan sampah secara rutin di Kampung Kawunen.

Program ini juga memperkuat peran perguruan tinggi melalui Universitas Primagraha dalam memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan masyarakat melalui kegiatan pengabdian. Keterlibatan mahasiswa KKM Kelompok 19 sebagai fasilitator mampu menjembatani komunikasi dan koordinasi antarpihak hingga terbentuknya mekanisme layanan pengangkutan sampah yang disepakati bersama. Keberlanjutan program diharapkan dapat diteruskan oleh masyarakat, pengurus RT/RW, Pemerintah Kelurahan Teritih, dan pihak terkait setelah masa KKM berakhir, sehingga FORSAM tidak hanya menjadi program pengabdian mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kampung Kawunen.

SARAN

Agar program FORSAM dapat berjalan secara berkelanjutan, diperlukan komitmen bersama antara masyarakat, pengurus RT/RW, Pemerintah Kelurahan Teritih, dan pihak ketiga dalam menjaga keberlangsungan layanan pengangkutan sampah yang telah disepakati. Mekanisme pengangkutan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala agar tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta dapat disesuaikan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Masyarakat juga diharapkan terus berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung keberlangsungan layanan yang telah terbentuk. Program FORSAM juga dapat dikembangkan melalui kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, seperti edukasi pemilahan sampah, pengurangan sampah rumah tangga, maupun pengembangan kegiatan pengelolaan sampah lainnya sesuai kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Anisykurlillah, R., Sampe, S., & Bataha, K. (2024). Evaluation of Waste Management Policy in Malang City. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *7*(1), 31–37. https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.2791

Anshell & Gash. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *Volume 18*(Issue 4), Pages 543–571.

https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Ariyadi, F., & Afriandi, F. (2024). The Role of Government and Community Collaboration in the Implementation of Waste Management Policies in Palu City. *Journal of Management and Administration Provision*, *4*(2), 179–187. https://doi.org/10.55885/jmap.v4i2.382

Erfanti, M., & Nurdin, N. (2024). Collaboration of Tangerang City Government in Waste Management through Waste Bank. *… Public Administration and Government*, *6*(December), 146–153. https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/article/view/1632%0Ahttps://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/article/download/1632/536

Fasya, A. H. Z., Ibad, M., El Muna, K. U. N., Pratiwi, S. F., & Arum, S. A. S. (2025). a Systematic Review of Solid Waste Management in Indonesia: Generation, Characteristics, Treatment, and Regulation. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, *17*(4), 333–342. https://doi.org/10.20473/jkl.v17i4.2025.333-342

Kementerian Lingkungan Hidup. (2025). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). https://sampahnasional.kemenlh.go.id/

Kurhayadi. (2021). Collaborative Governance in Waste Management in Bandung City. *International Journal of Science and Society*, *3*(4), 236–244. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v3i4.482

Laksmiwati, I. A. A., Suarsana, I. N., & Wedasantara, I. B. O. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa Baktiseraga Kabupaten Buleleng. *Bumi Lestari Journal of Environment*, *23*(2), 115. https://doi.org/10.24843/blje.2023.v23.i02.p12

Ma'ruf, M. F., Muzaqi, A. H., & Ramadhani, G. T. (2025). Polycentric Collaborative Governance and Circular Economy in Urban Waste Systems: Public Value Co-Creation Through CSR–Community Partnerships in Surabaya, Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, *9*(3), 408–421. https://doi.org/10.36574/jpp.v9i3.781

Nandira, A. P., & Soedarto, J. P. (2024). *Proses Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Badan Usaha Milik Desa Murakabi Desa Gondosari Kudus*.

Nur, Y. H., Sutasurya, D., Sutadian, A. D., Alamsyah, R., Diana, M., Vitriana, A., Hanifa Ma'ruf, I., Wijaya, S. R., & Indranoviyanti, W. (2023). Analisis Pembiayaan Pengelolaan Sampah Perdesaan

Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, *21*(2), 361–375. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/46241

Pamungkas, T. S., Masqurin, S. N., & Sutomo, S. (2024). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Inovatif*, *4*(3), 905–914. https://doi.org/10.54082/jupin.378

Prasetyani, A. B. M., & Isbandono, P. (2025). Implementasi program pengelolaan sampah berbasis Collaborative Governance di Desa Kediren, Kabupaten Lamongan. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, *3*(3), 138–155.

Purnama sari, D. (2026). *Menteri Hanif Faisol minta warga Serang tingkatkan pilah sampah*. ANTARA News. https://banten.antaranews.com/amp/berita/377058/menteri-lh-sebut-pemerintah-percepat-pembangunan-fasilitas-wte-di-banten

Sabarna, M. A. N., & Ramdani, R. (2025). *Jurnal PUBLISIA*. *10*(1), 33–45. http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

Wicaksana, H. H., Parmanto, C., & Fauzi, M. (2025). The Context of the Collaborative Governance Systems in Organic Waste Management is a Public Service in the Urban Area of Lebak Regency. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, *9*(2), 327–352. https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i2.61963